



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

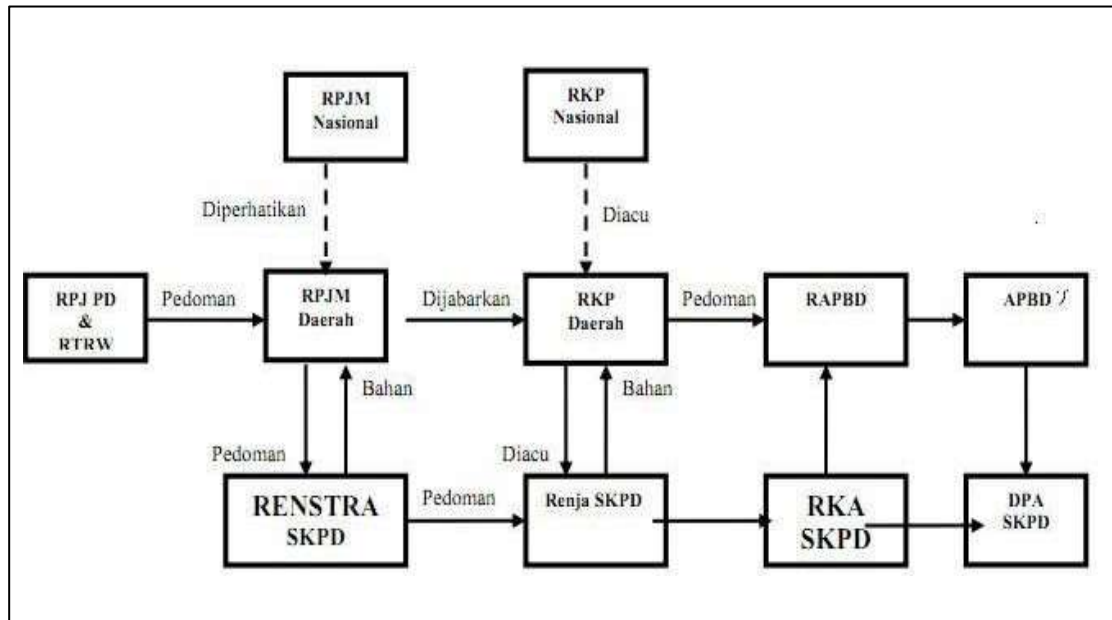
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. pasal 11 ayat 3 huruf b, disebutkan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terhadap dokumen

perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat .
- 2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Tinda Lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan Keentuan peraturan lainnya yang megatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam peyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok – pokok materi yang disampaikan antara lain :

- a. Realisasi rogram/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/ kegiatan/sb kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja rogram/kegiatan/ subkegiatan ;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fngsi perangkat daerah

2.4 Review terhadap rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan teradap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi rogram dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V. PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah beserta cap stempel Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023, secara garis besar tercapai dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 95,83%
 2. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan target indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik tercapai 60%
- b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo) sebesar 84 Indeks telah tercapai melalui 8 kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pencapaian indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program aplikasi informatika dengan target indikator Layanan SPBE sebesar 3 indeks telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan target indikator program Cakupan pelayanan data statistik sektoral sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 18% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- 1) Faktor utama terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah dukungan dana dari APBD
- 2) Perencanaan program/kegiatan yang berkualitas
- 3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Kudus

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan)	
						Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024 / n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
			K	K	K		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84 Indeks	87,15	100		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84 Indeks	87,15	100		
<i>X.XX.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	<i>11 Dokumen</i>	11	100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8	100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	100		
<i>X.XX.01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						

		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuanganyang sesuai standar	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	23	95,83		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Jumlah dokumen administrasiBMD sesuai standar	1 Dokumen	1	100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1	100		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3	100		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12800 orang	12800	100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100	100		

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40	100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	1 paket	1	100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6	100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	11 Unit	11	100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	5	100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6	100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4	100		

X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Jumlah unit BMD yang dipeliharasesuai standar	82 Unit	82	100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12	100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70	100		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
		Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media	100 persen	100	100		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	72 %	72	100		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen	5	100		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200 kegiatan	579	100		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	214 Dokumen	274	100		

		Komunikasi Publik					
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	12	60		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media						
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	2	100		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1	100		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6	100		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
		Indeks SPBE	2 Indeks	3,38	100		
		Kebijakan Internal SPBE	3 Indeks	3,9	100		
		Layanan SPBE	3 Indeks	3,82	100		
		Tata Kelola SPBE	2 Indeks	3	100		
2.16.03.2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						
		<i>Jumlah perangkat daerah/unitkerja yang terlayani jaringan</i>	209 Unit	209	100		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 Unit	209	100		
2.16.03.2.02	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						
		<i>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</i>	127 Unit	127	100		

2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1	100		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	3	100		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1	100		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 %	100	100		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	1	100		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1	100		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang	200	100		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24 %	24	100		

2.21.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						
		<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</i>	6 PD	6	100		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1	100		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7	100		
JUMLAH							
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)					99,57		
Predikat Kinerja					SangatTinggi		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah
2. Kemudahan dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal - Tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah
3. Adanya komitmen dan profesionalitas dari SDM pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
5. Adanya sinergi lintas OPD dan instansi yang memudahkan pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah serta Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana;
6. Adanya kemitraan dan sinergi yang profesional dengan rekanan media sehingga kegiatan Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana;
7. Pelaksanaan kegiatan Layanan Hubungan Media, yang sempat tertunda, telah berhasil dilaksanakan dengan baik berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara Diskominfo, rekan media, serta stakeholder terkait lainnya;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator SPM (standar pelayanan minimal) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Analisis kinerja pelayanan dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui indikator-indikator kinerja yang telah dipenuhi maupun belum dipenuhi. Analisis kinerja tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi Th 2025 (n+)	Catatan
				Th 2022 (n-2)	Th 2023 (n-1)	Th 2024 (n)	Th 2025 (n+1)	Th 2022 (n-2)	Th 2023 (n-1)	Th 2024 (n)		
1	2	3	4	12	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,68	-			3.38				
2	Nilai evaluasi SAKIP OPD			87,00	-			82,37				
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			79,00	-			85.95				
4	Cakupan pelayanan data statistik sektoral			100%	-			100%				
5	Persentase fasilitasi persandian			18%	-			82%				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			-	2.87				4.23			
2	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			-	91.00				70,95			
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			-	81.00				93,84			
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			-	50.00				50,23			
5	Rasio ketercukupan data statistik sektoral			-	60.00				100,00			

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi Th 2025 (n+)	Catatan
				Th 2022 (n-2)	Th 2023 (n-1)	Th 2024 (n)	Th 2025 (n+1)	Th 2022 (n-2)	Th 2023 (n-1)	Th 2024 (n)		
1	2	3	4	12	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					4.23	4.23		4.23		4.23	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik					93.84	93.84		93.84		93.84	
3	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah					82.39	82.40		70.95		82.40	

Keterangan :

1. Pada Indeks SPBE walaupun sudah memenuhi target dan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, tetapi harus ada peningkatan. Dalam hal mengoptimalkan Indeks SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengoptimalkan pada Domain manajemen SPBE dan akan melaksanakan sosialisasi penguatan penerapan SPBE pada Perangkat Daerah. sehingga perlu penganggaran untuk Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi/Sistem Informasi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK, Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. Anggaran untuk menunjang SPBE harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus komprehensif dan mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung keberlanjutan SPBE.
2. Pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik walaupun sudah memenuhi target, tetap harus ada peningkatan. Dinas Komunikasi dan Informatika harus mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu dengan mempercepat respons atas aduan masyarakat, Optimalisasi Media Sosial, penggunaan aplikasi aduan secara maksimal sehingga perlu penganggaran untuk publikasi baik media cetak, online maupun televisi, pres tour, kemitraan komunikasi.
3. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus belum tercapai sesuai target dikarenakan terdapat perubahan regulasi yang mengatur tentang parameter Penilaian AKIP Perangkat Daerah. Selain hal tersebut, pada Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki pegawai yang pernah mengikuti diklat SAKIP. Maka diperlukan anggaran untuk pengiriman peserta diklat yang linear dengan SAKIP sebagai upaya peningkatan Evaluasi SAKIP.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PERMASALAHAN		
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
		Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektor
			Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah
			Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar
2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi publik

3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun dengan berdasar pada RPD dan Rancangan Awal RKPD selanjutnya disesuaikan dengan analisis perkembangan dinamika kebutuhan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga mengakomodir isu-isu penting yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Review terhadap RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

2	16	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100%	Rp 4,028,514,000	2	16	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100%	Rp 4,028,514,000
2	16	01	2	02	01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan	Rp 3,918,276,000	2	16	01	2	02	01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan	Rp 3,918,276,000
2	16	01	2	02	02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 90,000,000	2	16	01	2	02	02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 90,000,000
2	16	01	2	02	03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 20,238,000	2	16	01	2	02	03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 20,238,000
2	16	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100%	Rp 6,200,000	2	16	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100%	Rp 6,200,000
2	16	01	2	03	02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 6,200,000	2	16	01	2	03	02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 6,200,000
2	16	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12%	Rp 9,505,840,000	2	16	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12%	Rp 9,505,840,000
2	17	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 150,000,000	2	17	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 150,000,000
2	17	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	Rp 9,355,840,000	2	17	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	Rp 9,355,840,000
2	16	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	Rp 260,600,000	2	16	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	Rp 260,600,000
2	16	01	2	06	02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	Rp 53,230,000	2	16	01	2	06	02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	Rp 53,230,000
2	16	01	2	06	04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Rp 35,362,000	2	16	01	2	06	04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Rp 35,362,000
	16	01	2	06	05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	Rp 20,162,000		16	01	2	06	05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	Rp 20,162,000
2	16	01	2	06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	Rp 10,800,000	2	16	01	2	06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	Rp 10,800,000
2	16	01	2	06	09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	Rp 141,046,000	2	16	01	2	06	09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	Rp 141,046,000

2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 170,000,000	2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 270,000,000
2	16	01	2	07	05	Subkegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	Rp 15,860,000	2	16	01	2	07	05	Subkegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	Rp 15,860,000
2	16	01	2	07	10	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	Rp 154,140,000	2	16	01	2	07	10	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	Rp 254,140,000
2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	Rp 3,750,000,000	2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	Rp 3,750,000,000
2	16	01	2	08	01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	Rp 3,500,000	2	16	01	2	08	01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	Rp 3,500,000
	16	01	2	08	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 3,746,500,000	2	16	01	2	08	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 3,746,500,000
2	16	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	Rp 317,000,000	2	16	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	Rp 317,000,000
2	16	01	2	09	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Rp 267,829,000	2	16	01	2	09	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Rp 267,829,000
2	16	01	2	09	06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Rp 49,171,000	2	16	01	2	09	06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	Rp 49,171,000
2	16	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai	Rp 5,116,510,000	2	16	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai	Rp 5,016,510,000
2	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</i>	<i>100 persen</i>	<i>Rp 5,116,510,000</i>	2	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</i>	<i>100 persen</i>	<i>Rp 5,016,510,000</i>

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan yang diperoleh melalui Aspirasi anggota DPRD, Musrenbang maupun Musrenbang Kecamatan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	4	6

--NIHIL--

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2023, perkiraan 2024, tantangan yang dihadapi tahun 2026, serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Nasional yaitu “Transformasi Tata Kelola” sehingga dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditempuh.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023-2026. Pelaksanaan arah kebijakan prioritas pembangunan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disinkronkan dengan program-program yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif “ serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus yaitu “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel”, melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
- b. Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program penyelenggaraan statistik sektoral
- e. Program penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus untuk urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistika, dan urusan persandian, dapat ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika. tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN RB.
2. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik
Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Sasaran jangka menengah adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.
Indikator sasarannya : Indeks SPBE
2. Meningkatnya akses terhadap informasi publik.
Indikator sasarannya : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator sasarannya : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70	71.9	73
		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3.50	3.60	3.70
		Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	87.00	88.00	89.00
2	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30.42	30.43	30.45
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.39	82.40	82.41

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 24.636.038.000,00 yang bersumber dari APBD murni dana DBHCHT.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan 3 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang terdiri dari 5 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 2 (dua) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 12 kegiatan, 42 sub kegiatan dibiayai dengan APBD dan 1 sub kegiatan dibiayai dengan dana DBHCHT.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang terdiri atas 8 kegiatan terkait (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total kebutuhan pagu indikatif dalam Rencana program dan kegiatan Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 24.636.038.000 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kudus dan dana DBHCHT.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat Daerah (Kominfo)</i>		87.15 indeks											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar		11 Dokumen											

	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		8 dokumen										
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</i>		3 laporan										
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>		12 laporan										
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		24 orang										
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		12 Dokumen										
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12 Dokumen										
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar</i>		1 dokumen										
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>		1 Dokumen										
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar</i>		1 laporan										

	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		3 Orang										
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		12800 Orang										
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar</i>		100 persen										
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		40 Paket										
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket										
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		7 Paket										
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>		12 Dokumen										
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 Laporan													
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)</i>		11 unit													
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		5 Unit													
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		6 Unit													
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</i>		12 laporan													
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		4 Laporan													
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan													
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar</i>		82 unit													
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>		12 Unit													

	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		70 Unit										
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media</i>		100 persen										
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas</i>		72 persen										
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		5 dokumen										
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		579 dokumen										
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		320 konten										
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 dokumen										
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media													
			Jumlah Layanan Hubungan Media		2 layanan										

	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 dokumen										
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6 unit										
3.	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	- <i>Indeks SPBE</i> - <i>Kebijakan Internal SPBE</i> - <i>Layanan SPBE</i> - <i>Tata Kelola SPBE</i>		3.38 indeks 3.90 indeks 3.82 indeks 3.00 indeks										
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan</i>		209 unit										
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		209 unit kerja										
	2.16.03.2.02	Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data		127 unit										
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 unit										

	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		3 unit										
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 dokumen										
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Cakupan pelayanan data statistik sektoral</i>		100 persen										
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen statistik sektoral</i>		1 dokumen										
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
		Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1 dokumen											
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		200 orang										

	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian</i>		24 persen											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</i>		6 PD											
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 laporan											
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		7 perangkat daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.504.589.100,00								28.514,620,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.504.589.100,00								28.514,620,000.00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.315.028.100,00								28,167,620,000.00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 nilai			44 nilai	9.633.960.000,00							44 nilai	19,969,529,000.00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	14.561.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	12.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	7,698,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

	2.16.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	793,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		5.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	6,070,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		5.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</i>	100 persen			100 persen	4,493,713,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	4.195.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/bulan	4,410,575,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		4.075.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	72,900,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	10,238,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</i>	100 persen			100 persen	6,000,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</i>	12 persen			12 persen	592,205,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	12 persen	9.880.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	67,205,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				500 Orang	525,000,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		9.730.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</i>	100 persen			100 persen	265,460,900.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	260.702.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				40 Paket	62,601,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		53.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	33,004,400.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		35.362.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan															

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	18,049,500.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		20.162.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	10,800,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		10.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	141,006,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	141.048.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</i>	100 persen			100 persen	100,762,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit			2 Unit	7,594,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Unit	15.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit			5 Unit	93,168,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Unit	159.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</i>	100 persen			100 persen	3,895,312,100.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	5,019,134,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4 Laporan			12 Laporan	4,000,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Laporan	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	3,215,796,100.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	4.105.634.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	675,516,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	910,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	100 persen			100 persen	265,946,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	100 persen	420,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	231,480,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		370,821,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	50 Unit			50 Unit	34,466,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	50 Unit	49,179,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Nilai Survey Kepuasan Publik</i>	83 nilai			83 nilai	5,038,344,000.00						83 nilai	5,079,591,000.00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</i>	100 persen			100 persen	5,038,344,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus	100 persen	5,079,591,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi</i>				2 Laporan	197,122,000.00	Kab.	DANA	-	4. Peningkatan tata	Semua		209,000,000.00	DINAS

			<i>media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>						Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				1 Komunitas	56,100,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		71.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				25 Permohonan	55,874,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		72.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				52 Rekomendasi	190,331,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		209.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>				100 Persentase	4,028,651,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		3.961.342.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				2 Media	510,266,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		555.929.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Nilai SPBE domain tata kelola</i>	4,4 nilai			4,4 nilai	642,724,100.00						4,4 nilai	3,118,500,000.00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</i>	98 aplikasi			96 aplikasi	642,724,100.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	98 aplikasi	3,118,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				1 Laporan	11,346,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>				1 Dokumen	114,987,500.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>				2 Aplikasi	9,980,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				1 Aplikasi	19,957,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			<i>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas</i>				41 unit	9,890,500.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				3 Perangkat Daerah	470,607,400.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		2.530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>				1 Dokumen	5,955,700.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						131,770,000.00							197.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Indeks Pembangunan Statistik</i>	2,9 indeks			2,9 indeks	131,770,000.00						2,9 indeks	197.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketercukupan data statistik sektoral</i>	100 persen			100 persen	131,770,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan	Semua Perangkat Daerah Kabupaten	100 persen	197.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

											tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	n Kudus			
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				180 Orang	47,024,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	82.500.000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional													
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>				100 Persentase	34,992,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	48.500.000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				5 Dokumen	24,957,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	33.000.000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar													
			<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>				3 Dokumen	24,797,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	33.000.000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						57,791,000.00						150,000,000.00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		<i>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</i>	270 indeks		270 indeks	57,791,000.00						270 indeks	150,000,000.00

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian</i>	57 persen			56 persen	57,791,000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	57 persen	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	38,097,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		110,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1 Laporan			1 Laporan	19,694,000.00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	1 Laporan	40,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J U M L A H							15.504.589.100,00							28.514.620.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2025. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang ada ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Kudus, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002